



Analisis Retorika Politik dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80 Tahun 2025

Muhammad Diqqi Miftahul Anwar

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang

Fitria Nur 'Aini

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang

Alamat: Jl. Woltermonginsidi No. 119 Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Korespondensi penulis: dickymiftahulanwar2@gmail.com

Abstrak. *This study analyzes President Prabowo Subianto's inaugural speech at the 80th United Nations (UN) General Assembly in 2025 by applying Harold D. Lasswell's communication model and Aristotelian rhetoric. The analysis focuses on identifying the communicator, message, channel, audience, and communication effects, while also examining rhetorical strategies and the global relevance of the speech. Findings reveal that Prabowo's address not only reaffirmed Indonesia's commitment to multilateralism and global humanitarian issues but also strengthened the nation's diplomatic stance through the effective use of ethos, pathos, and logos. The speech framed Palestine, food security, and climate change as universal challenges requiring collective solidarity. This research highlights how political communication in international forums can serve as a strategic tool to build legitimacy and enhance national image in the global arena.*

Keywords: *global diplomacy; Lasswell; political communication; presidential speech; rhetoric;*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pidato perdana Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 tahun 2025 dengan menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell serta pendekatan retorika Aristotelian. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi komunikator, pesan, saluran, audiens, dan dampak komunikasi, sekaligus membedah strategi retorika dan relevansi global pidato tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pidato Prabowo tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan isu-isu kemanusiaan global, tetapi juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia melalui penggunaan *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Pidato ini membingkai isu Palestina, ketahanan pangan, dan perubahan iklim sebagai tantangan universal yang membutuhkan solidaritas global. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik di forum internasional dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun legitimasi dan memperkuat citra bangsa.

Kata kunci: *diplomasi global; Lasswell; komunikasi politik; pidato presiden; retorika;*

PENDAHULUAN

Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September 2025 menjadi sorotan penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme, solidaritas global, serta penegasan dukungan terhadap Palestina sebagai isu utama (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2025). Fenomena ini menjadi relevan karena pidato presiden dalam forum internasional tidak hanya mencerminkan posisi politik luar negeri, tetapi juga menjadi instrumen komunikasi politik yang membentuk citra negara di mata dunia.

Dalam konteks komunikasi politik, pidato seorang kepala negara dipandang sebagai praktik retorika yang bertujuan membangun legitimasi, menyampaikan pesan diplomasi, dan memperkuat identitas politik bangsa. Menurut McNair (2018), komunikasi politik melibatkan interaksi antara

aktor politik, media, dan publik, di mana pidato politik menjadi salah satu bentuk artikulasi wacana yang berfungsi memengaruhi persepsi khalayak. Pidato di forum global seperti PBB merupakan *arena simbolik* yang memungkinkan pemimpin negara mengartikulasikan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi terhadap agenda global.

Retorika politik yang digunakan dalam pidato juga merupakan strategi penting dalam memperkuat pesan. Perloff (2021) menyebut bahwa retorika politik mengandung unsur persuasi yang dapat memengaruhi audiens melalui bahasa, narasi historis, serta simbol kolektif. Hal ini terlihat dalam pidato Prabowo yang mengaitkan perjuangan kolonialisme Indonesia dengan solidaritas bagi Palestina. Dengan demikian, penggunaan narasi historis bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan strategi retorik untuk menguatkan legitimasi posisi Indonesia di hadapan komunitas internasional.

Selain itu, pidato politik presiden di forum internasional dapat dianalisis sebagai praktik diplomasi publik. Melissen (2005) menegaskan bahwa diplomasi publik merupakan upaya negara untuk berkomunikasi dengan publik asing guna membangun citra positif dan memengaruhi opini global. Dalam kasus Indonesia, penyampaian dukungan terhadap Palestina sekaligus komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan merepresentasikan strategi diplomasi publik yang menggabungkan nilai moral dan kepentingan nasional.

Kajian sebelumnya telah banyak membahas pidato politik para pemimpin dunia, baik dalam konteks analisis retorika maupun komunikasi diplomatik. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Edwards (2009) mengenai pidato Presiden Amerika Serikat di forum internasional menunjukkan bahwa pidato dapat berfungsi ganda sebagai instrumen kebijakan luar negeri sekaligus alat pembentukan opini publik global. Namun, studi terkait pidato perdana Prabowo di PBB belum banyak dilakukan, sehingga terdapat ruang penelitian untuk mengisi kekosongan kajian ini.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis terhadap pidato Prabowo dalam perspektif komunikasi politik internasional. Jika sebelumnya kajian lebih banyak difokuskan pada pidato presiden terdahulu seperti Susilo Bambang Yudhoyono atau Joko Widodo dalam konteks diplomasi ekonomi dan pembangunan (Suryokusumo, 2014), maka penelitian ini mencoba menelaah pidato Prabowo dengan fokus pada isu multilateralisme dan Palestina. Dengan demikian, terdapat pembaruan dalam objek kajian dan relevansi terhadap dinamika politik global kontemporer.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur komunikasi politik dalam pidato Prabowo di PBB ke-80 merepresentasikan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan isu Palestina. Pertanyaan ini menjadi penting karena melalui pidato, seorang presiden tidak hanya menyampaikan pesan substantif, tetapi juga membangun *framing* tertentu atas peran negaranya di dunia internasional. Analisis semacam ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai relasi antara retorika politik dan diplomasi.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara sistematis pidato Presiden Prabowo Subianto dalam forum PBB ke-80 melalui perspektif komunikasi politik dan teori retorika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian komunikasi politik internasional, sekaligus memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana pidato presiden berperan dalam membentuk citra dan posisi Indonesia di kancah global.

KAJIAN TEORI

Komunikasi politik merupakan disiplin yang menelaah hubungan antara pesan, media, dan aktor politik dalam proses pembentukan opini publik maupun pengambilan keputusan politik. McNair (2018) menjelaskan bahwa komunikasi politik berfungsi sebagai sarana penyampaian gagasan politik sekaligus alat legitimasi kekuasaan. Pidato politik seorang presiden dapat dipahami sebagai praktik komunikasi politik yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat domestik, tetapi juga kepada audiens global dalam kerangka diplomasi.

Dalam kajian retorika politik, pidato dipandang sebagai wacana yang dibangun melalui strategi bahasa untuk memengaruhi sikap, emosi, dan pandangan audiens. Aristoteles membagi retorika menjadi tiga komponen utama yakni *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Konsep ini tetap relevan hingga kini, karena dalam pidato politik modern, kredibilitas pembicara (*ethos*), daya tarik emosional (*pathos*), serta kekuatan argumentasi logis (*logos*) menjadi perangkat utama untuk membangun persuasi (Perloff, 2021). Dengan demikian, pidato di forum internasional dapat dilihat sebagai praktik retorik yang menggabungkan nilai moral dan strategi politik.

Teori komunikasi Harold D. Lasswell menjadi kerangka analisis yang relevan dalam penelitian ini. Lasswell (1948) merumuskan model komunikasi dengan pertanyaan fundamental: *Who says what in which channel to whom with what effect*. Model ini memungkinkan peneliti menganalisis pidato Prabowo dengan menyoroti siapa komunikatornya, pesan apa yang disampaikan, saluran komunikasi yang digunakan, audiens yang dituju, serta dampak yang ditimbulkan. Keunggulan model ini adalah kesederhanaannya dalam menjelaskan proses komunikasi politik, meskipun sejumlah kritik menyebutnya terlalu linear dalam memahami kompleksitas komunikasi kontemporer (Littlejohn & Foss, 2017).

Dalam konteks diplomasi publik, pidato politik di forum multilateral dapat dipahami sebagai sarana membangun citra dan memengaruhi opini internasional. Melissen (2005) menekankan bahwa diplomasi publik merupakan dimensi baru hubungan internasional yang menempatkan komunikasi sebagai instrumen utama dalam membentuk *soft power*. Ketika presiden menyampaikan komitmen terhadap multilateralisme dan solidaritas global, hal tersebut merupakan bentuk komunikasi strategis yang berfungsi memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa retorika politik presiden sering digunakan untuk membingkai posisi negara dalam isu global. Edwards (2009), misalnya, menemukan bahwa retorika Presiden Amerika Serikat pasca-9/11 bukan hanya instrumen persuasi domestik, tetapi juga berperan dalam memengaruhi persepsi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pidato presiden dapat berfungsi ganda sebagai wacana nasional sekaligus sebagai alat diplomasi publik. Dengan merujuk pada studi tersebut, analisis pidato Prabowo menjadi penting karena dapat mengungkap strategi retorik yang digunakan Indonesia untuk mengartikulasikan posisinya dalam isu Palestina dan multilateralisme.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan teori komunikasi Lasswell untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam pidato Prabowo serta teori retorika politik sebagai dasar analisis strategi persuasi. Kombinasi kedua teori ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana pesan politik Indonesia dikonstruksi, disampaikan, dan diproyeksikan dalam ruang komunikasi internasional. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menguraikan isi pidato, tetapi juga memahami peran pidato tersebut dalam konteks komunikasi politik global.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami makna dan strategi komunikasi dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial-politik yang sarat dengan konstruksi makna, simbol, dan konteks. Creswell (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna dan interpretasi teks maupun praktik sosial, sehingga cocok digunakan dalam analisis komunikasi politik.

Objek penelitian berupa naskah pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada 23 September 2025 di New York. Data primer penelitian ini adalah teks pidato tersebut, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Kementerian Sekretariat Negara, pemberitaan media, serta literatur akademik terkait komunikasi politik dan retorika. Hal ini dilakukan untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber (Denzin & Lincoln, 2018).

Metode analisis yang digunakan adalah analisis retorika politik dengan kerangka teori Harold D. Lasswell. Model Lasswell yang terdiri dari elemen *who says what in which channel to whom with what effect* memungkinkan peneliti memetakan struktur komunikasi politik dalam pidato. Analisis difokuskan pada identifikasi aktor (presiden sebagai komunikator), pesan utama yang disampaikan, medium penyampaian (forum PBB), audiens yang dituju (delegasi internasional), serta dampak potensial dari pidato tersebut terhadap wacana global.

Selain itu, analisis retorika klasik digunakan untuk mengidentifikasi strategi persuasif melalui elemen *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Seperti dijelaskan oleh Foss (2018), retorika dapat dipahami sebagai seni membangun makna melalui bahasa untuk menghasilkan dampak tertentu pada audiens. Oleh karena itu, kombinasi teori Lasswell dan teori retorika dipakai untuk menyingkap bagaimana pidato Prabowo dikonstruksi dan diarahkan pada pembentukan citra Indonesia di kancah internasional.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data pidato secara lengkap dari sumber resmi. Kedua, transkripsi dan pembacaan mendalam untuk menemukan tema-tema utama. Ketiga, kategorisasi tema berdasarkan dimensi model Lasswell dan perangkat retorika. Keempat, interpretasi makna dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik global, khususnya isu Palestina, multilateralisme, dan diplomasi publik.

Untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan *peer debriefing*. Denzin dan Lincoln (2018) menekankan pentingnya verifikasi silang antar-sumber serta diskusi kritis dengan rekan sejawat guna memastikan interpretasi yang lebih objektif. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman teoretis yang mendalam mengenai praktik komunikasi politik presiden di forum internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikator

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 tidak dapat dilepaskan dari identitas komunikator yang membawakan pesan. Dalam teori komunikasi politik, figur komunikator sangat menentukan efektivitas penyampaian pesan karena kredibilitas dan otoritasnya memengaruhi daya terima audiens (McNair, 2018). Prabowo hadir sebagai kepala negara yang baru menjabat, sehingga pidato ini sekaligus menjadi ajang pengenalan dirinya di hadapan komunitas internasional.

Sebagai seorang presiden, Prabowo memegang peran ganda, yakni sebagai representasi negara dan sebagai individu dengan sejarah politik panjang. Dalam kerangka model Lasswell,

posisi komunikator ini penting untuk menjawab pertanyaan “who” dalam proses komunikasi (Lasswell, 1948). Audiens global tidak hanya menilai pesan yang disampaikan, tetapi juga latar belakang pribadi dan politik komunikator yang memengaruhi interpretasi mereka.

Prabowo dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang militer sebelum memasuki dunia politik sipil. Pengalaman ini menambah bobot *ethos* dalam retorika, karena kredibilitas komunikator dapat dibangun dari rekam prestasi dan peran publik sebelumnya (Aristotle, trans. Kennedy, 2007). Kehadiran Prabowo di forum PBB membawa citra seorang pemimpin yang tegas, disiplin, serta berpengalaman dalam isu keamanan dan pertahanan, yang relevan dalam konteks diskusi geopolitik global.

Selain faktor pengalaman, status Prabowo sebagai presiden baru juga memberi nuansa tertentu pada pidatonya. Bagi komunitas internasional, pidato perdana seorang pemimpin baru biasanya menjadi indikator arah kebijakan luar negeri yang akan diambil. Menurut Nye (2004), komunikasi politik dalam diplomasi publik berfungsi membangun *soft power*, yaitu kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik dan legitimasi, bukan semata melalui kekuatan militer atau ekonomi. Dalam konteks ini, Prabowo berusaha meneguhkan citra Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung multilateralisme dan keadilan global.

Identifikasi komunikator juga melibatkan aspek simbolik yang dibawa Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menentang kolonialisme, sehingga figur presidennya dipersepsikan sebagai pewaris tradisi politik tersebut. Dengan demikian, ketika Prabowo berbicara tentang isu Palestina, pesan itu diperkuat oleh identitas kolektif bangsa Indonesia yang dikenal aktif dalam gerakan Non-Blok dan diplomasi perdamaian (Suryadinata, 2017).

Dalam kajian retorika, kredibilitas komunikator bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga integritas moral dan kedekatan dengan audiens (*ethos*). Prabowo berusaha menampilkan dirinya bukan hanya sebagai presiden Indonesia, tetapi juga sebagai pemimpin dunia yang peduli pada penderitaan bangsa lain. Strategi ini menunjukkan bahwa identifikasi komunikator dibangun dengan menggabungkan aspek personal, institusional, dan moral, sehingga pesan memiliki legitimasi yang lebih luas.

Dengan demikian, analisis identifikasi komunikator menunjukkan bahwa posisi Prabowo sebagai komunikator tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh latar belakang personal, status politik, simbolisme nasional, dan strategi retorika. Keempat aspek ini memperlihatkan bagaimana efektivitas pidato politik di forum internasional sangat ditentukan oleh kredibilitas komunikator, yang dalam kasus ini berhasil dikonstruksi melalui kombinasi *ethos*, pengalaman militer, serta mandat politik sebagai presiden Indonesia.

2. Pesan yang Disampaikan (Says What)

Pesan utama dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan solidaritas global. Ia mengawali pidatonya dengan menegaskan prinsip bahwa seluruh manusia diciptakan setara, merujuk pada nilai universal yang juga menjadi dasar Piagam PBB. Dalam konteks teori komunikasi politik, pesan yang mengangkat nilai universal ini berfungsi membangun *common ground* dengan audiens global sehingga memperkuat resonansi pesan (McNair, 2018).

Fokus penting pidato Prabowo adalah dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pesan ini disampaikan berulang untuk menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Palestina. Retorika semacam ini dapat dikategorikan sebagai *moral appeal*, yaitu pesan yang menekankan pada nilai etika dan keadilan internasional (Charteris-Black, 2011).

Dengan menegaskan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian, pesan yang disampaikan bukan hanya simbolis tetapi juga mengandung tawaran konkret untuk solusi konflik.

Pesan lain yang disoroti adalah komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan peran aktif di PBB. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tetap percaya pada tatanan global berbasis aturan, sekalipun dunia tengah menghadapi krisis kepercayaan terhadap lembaga multilateral. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa komunikasi diplomatik seringkali digunakan untuk memperkuat legitimasi institusi internasional serta menunjukkan keselarasan dengan norma global (Bjola & Kornprobst, 2013).

Selain isu politik, pidato ini juga menekankan aspek pembangunan berkelanjutan. Prabowo menyoroti capaian Indonesia dalam swasembada pangan, ekspor beras, serta program mitigasi perubahan iklim. Pesan ini memperlihatkan upaya membangun citra Indonesia sebagai negara yang berkontribusi pada penyelesaian masalah global, sesuai konsep *nation branding* dalam diplomasi publik (Anholt, 2007). Dengan demikian, pesan yang disampaikan bukan hanya reaktif terhadap isu konflik, tetapi juga proaktif menawarkan solusi pada tantangan global.

Pidato ini juga mengandung pesan moral tentang penolakan terhadap doktrin kekuasaan “the strong do what they can, the weak suffer what they must”. Dengan mengutip Thucydides, Prabowo menggarisbawahi perlunya keadilan bagi semua bangsa tanpa memandang kekuatan militer atau ekonomi. Dalam retorika politik, penggunaan kutipan klasik semacam ini berfungsi memperkuat argumen dengan legitimasi historis dan intelektual (Beasley & Rudd, 2006).

Pesan lain yang cukup dominan adalah ajakan untuk membangun harapan dan optimisme di tengah krisis global. Prabowo menekankan bahwa umat manusia tidak boleh menyerah pada kebencian dan kekerasan, melainkan harus bersatu dalam cita-cita kemanusiaan. Menurut analisis retorika, pesan bernuansa harapan berfungsi sebagai *emotional appeal* yang menyasar ranah afektif audiens agar terbentuk rasa keterikatan emosional dengan komunikator (Perloff, 2017).

Prabowo juga mengirimkan pesan mengenai posisi Indonesia sebagai negara dengan kapasitas strategis dalam mendukung perdamaian dunia. Tawaran mengirim hingga 20.000 pasukan perdamaian menunjukkan bahwa pesan politik luar negeri Indonesia tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan dalam komitmen nyata. Dalam teori komunikasi internasional, pesan semacam ini dapat disebut sebagai *performative communication*, di mana ucapan di forum internasional sekaligus merupakan tindakan politik (Austin, 1962).

Dengan demikian, pesan yang disampaikan dalam pidato ini tidak tunggal, melainkan multi-dimensi: pesan moral tentang kesetaraan, pesan politik tentang Palestina dan multilateralisme, pesan pembangunan tentang ketahanan pangan dan iklim, serta pesan emosional tentang harapan. Semua pesan tersebut membentuk sebuah konstruksi retorika yang bertujuan menampilkan Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada keadilan global, aktif berkontribusi pada perdamaian, sekaligus siap menjadi bagian dari solusi atas tantangan kemanusiaan.

3. Saluran Komunikasi (In Which Channel)

Pidato Presiden Prabowo Subianto disampaikan pada Sidang Umum PBB ke-80, sebuah forum internasional yang menjadi saluran komunikasi politik paling bergengsi di dunia. Majelis Umum PBB dipandang sebagai panggung utama bagi negara-negara anggota untuk menyampaikan pandangan mereka tentang isu global. Menurut Weiss, Forsythe, dan Coate (2018), forum ini berfungsi tidak hanya sebagai arena deliberasi, tetapi juga sebagai ruang simbolik di mana legitimasi suatu negara diperkuat melalui komunikasi publik.

Saluran komunikasi yang digunakan Prabowo bersifat formal, diplomatik, dan terinstitusionalisasi. Pidato di forum internasional berbeda dengan komunikasi domestik karena setiap kata dipertimbangkan untuk menghindari interpretasi yang dapat menimbulkan konflik.

Seperti ditegaskan oleh Jönsson dan Hall (2005), diplomasi modern sangat bergantung pada penggunaan saluran resmi yang memiliki bobot legitimasi tinggi dalam sistem internasional.

Pidato tersebut juga diperkuat dengan distribusi luas melalui media massa internasional dan domestik. Saluran sekunder ini memungkinkan pesan Prabowo menjangkau audiens global yang lebih luas, termasuk publik internasional, akademisi, dan pembuat kebijakan. Hal ini menunjukkan fungsi ganda saluran komunikasi diplomatik: pertama, menyampaikan pesan kepada aktor negara di forum resmi, dan kedua, menyebarluaskan pesan kepada khalayak global melalui media (Gilboa, 2008).

Selain itu, penggunaan bahasa Inggris dalam pidato juga merupakan bagian dari strategi saluran komunikasi. Bahasa internasional ini berfungsi sebagai *lingua franca* diplomasi, yang memungkinkan pesan diterima oleh audiens multinasional tanpa hambatan bahasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Crystal (2003), dominasi bahasa Inggris dalam diplomasi global memudahkan transfer pesan lintas budaya dan memperkuat efektivitas komunikasi.

Namun, saluran komunikasi tidak hanya dilihat dari sisi teknis penyampaian, tetapi juga dari sisi simbolik. Dengan memilih forum PBB sebagai saluran utama, Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang tetap berkomitmen pada multilateralisme. Menurut teori *framing* dalam komunikasi politik, pemilihan saluran tertentu turut membentuk makna pesan, karena audiens mengasosiasikannya dengan kredibilitas forum yang digunakan (Entman, 1993).

Saluran komunikasi juga mencerminkan sifat komunikasi politik luar negeri yang bersifat *high-context*. Pidato di forum PBB bukan hanya disimak dari teks yang dibacakan, tetapi juga dari bahasa tubuh, intonasi, dan konteks politik yang menyertainya. Sebagaimana disampaikan Hall (1976), dalam budaya *high-context* makna komunikasi sering kali tersembunyi dalam simbol, gaya penyampaian, dan nuansa, bukan hanya dalam kata-kata eksplisit. Hal ini tampak dalam gaya retorika Prabowo yang tegas namun tetap diplomatis.

Dengan demikian, saluran komunikasi yang digunakan Prabowo tidak hanya terbatas pada podium Majelis Umum PBB, tetapi meluas ke jaringan media global, bahasa diplomasi internasional, serta simbolisme politik dari forum multilateral. Saluran ini secara strategis dipilih untuk memaksimalkan daya jangkau, legitimasi, dan resonansi pesan, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan politik global.

4. Audiens (To Whom)

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 ditujukan kepada audiens yang bersifat majemuk. Audiens primer terdiri atas para kepala negara, kepala pemerintahan, dan perwakilan diplomatik dari 193 negara anggota PBB. Menurut teori komunikasi politik, audiens semacam ini termasuk kategori *policy audience*, yakni kelompok yang memiliki kekuasaan langsung dalam membentuk kebijakan internasional (McNair, 2018). Oleh karena itu, struktur pesan dalam pidato disesuaikan untuk menysasar aktor-aktor negara dengan kepentingan geopolitik yang beragam.

Selain audiens primer, terdapat audiens sekunder berupa publik global yang menyaksikan pidato melalui media internasional. Keberadaan media sebagai penghubung memungkinkan pesan yang awalnya ditujukan untuk elite politik internasional dapat diterjemahkan menjadi konsumsi publik. Dalam perspektif diplomasi publik, audiens sekunder ini memegang peran penting dalam membentuk persepsi global terhadap Indonesia (Cull, 2009).

Pidato tersebut juga diarahkan kepada audiens domestik, yakni masyarakat Indonesia sendiri. Penyebaran rekaman pidato melalui media nasional menjadikan momentum ini sebagai sarana *nation branding*, yang memperkuat citra kepemimpinan Prabowo di mata rakyat. Menurut

Melissen (2005), komunikasi diplomatik sering kali bersifat *dual audience*, di mana satu pesan ditujukan sekaligus kepada audiens internasional dan domestik.

Audiens lain yang tidak kalah penting adalah komunitas internasional yang terfokus pada isu tertentu, seperti organisasi kemanusiaan, akademisi, serta kelompok advokasi perdamaian. Penekanan Prabowo pada isu Palestina dan ketahanan pangan dunia diarahkan untuk menarik perhatian kelompok ini. Menurut Nye (2004), *soft power* sangat bergantung pada sejauh mana pesan mampu memengaruhi aktor non-negara yang juga berperan dalam politik global.

Pidato di PBB juga menarget audiens generasi muda global, yang disebut Prabowo sebagai “anak-anak yang sedang menyaksikan.” Dengan menggarisbawahi peran generasi mendatang, pesan tersebut berfungsi membangun citra Indonesia sebagai negara yang berpikir ke depan dan peduli pada keberlanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan komunikasi politik kontemporer yang semakin menekankan keterlibatan generasi muda dalam wacana internasional (Loader et al., 2014).

Dengan demikian, audiens yang ditarget dalam pidato Prabowo bukan hanya satu kelompok homogen, melainkan berlapis-lapis: elite politik internasional, publik global, masyarakat domestik, komunitas internasional tematik, hingga generasi muda. Segmentasi audiens ini memperlihatkan strategi komunikasi yang kompleks dan multilevel, di mana satu pesan dirancang untuk diterima oleh berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda.

5. Dampak dan Efek Komunikasi (With What Effect)

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 memiliki dampak strategis dalam ranah diplomasi internasional. Dari perspektif komunikasi politik, pidato di forum internasional bukan hanya bersifat seremonial, melainkan instrumen yang dapat membentuk opini publik global dan memengaruhi agenda politik internasional (Entman, 2008). Dengan menekankan isu Palestina, Prabowo mengupayakan reposisi Indonesia sebagai aktor penting dalam advokasi keadilan global.

Efek lain yang menonjol adalah penguatan *soft power* Indonesia. Dengan mengajukan komitmen konkret seperti kesiapan mengirim pasukan perdamaian dan kontribusi finansial, Indonesia diposisikan bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai negara yang siap bertindak. Nye (2004) menegaskan bahwa *soft power* negara akan meningkat jika ia mampu memproyeksikan nilai moral dan kemanusiaan yang diterima luas oleh komunitas internasional.

Pidato ini juga memiliki efek domestik yang signifikan. Masyarakat Indonesia yang menyaksikan pidato melalui media melihat representasi kepemimpinan yang percaya diri di panggung global. Hal ini dapat memperkuat legitimasi politik Prabowo di dalam negeri, terutama pada awal masa pemerintahannya. Menurut Graber (2001), komunikasi politik di arena internasional sering dimanfaatkan untuk tujuan domestik, guna memperkokoh citra dan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin.

Selain itu, pidato tersebut mendorong efek simbolik bagi dunia internasional. Dengan menekankan kesetaraan universal dan solidaritas kemanusiaan, pesan ini menghidupkan kembali narasi historis Indonesia sebagai negara yang pernah memperjuangkan kemerdekaan melalui solidaritas global. Efek simbolik ini penting karena dalam diplomasi, makna dan simbol sering kali memiliki daya pengaruh yang sama besarnya dengan kebijakan substantif (Hall, 1997).

Dari sisi audiens internasional, terutama negara-negara berkembang, pidato Prabowo dapat menciptakan efek konfirmasi bahwa Indonesia adalah bagian dari *Global South* yang memperjuangkan keadilan global. Hal ini memperkuat solidaritas antarnegara berkembang dan berpotensi meningkatkan kerja sama multilateral. Seperti dijelaskan Acharya (2014), negara-

negara Asia dan Afrika sering menggunakan platform multilateral untuk menegaskan identitas dan solidaritas mereka dalam menghadapi dominasi negara besar.

Efek komunikasi juga terlihat pada terbentuknya wacana baru mengenai peran Indonesia dalam isu ketahanan pangan dan perubahan iklim. Dengan menekankan capaian swasembada beras dan komitmen transisi energi, pidato ini mengukuhkan citra Indonesia sebagai *problem solver* dalam isu global kontemporer. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan internasional terhadap kapasitas Indonesia sebagai mitra pembangunan.

Pada akhirnya, dampak terbesar dari pidato ini adalah penciptaan narasi bahwa Indonesia tidak hanya hadir di forum global sebagai peserta, tetapi sebagai pemimpin moral yang berupaya menjembatani perbedaan dan menegakkan keadilan. Efek jangka panjang dari komunikasi semacam ini bergantung pada konsistensi kebijakan luar negeri yang mendukung pesan yang telah disampaikan. Jika konsistensi ini dapat dijaga, pidato Prabowo di PBB akan dikenang sebagai tonggak penting dalam diplomasi Indonesia di abad ke-21.

6. Analisis Strategi Retorika

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 menampilkan penggunaan strategi retorika yang sistematis untuk membangun legitimasi politik internasional. Aristoteles (2007) membagi retorika ke dalam tiga dimensi utama yaitu *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Ketiganya tampak secara simultan dalam pidato tersebut, di mana Prabowo berusaha membangun kredibilitas, menggugah emosi audiens, serta menyajikan argumen rasional untuk memperkuat posisinya.

Strategi *ethos* terlihat jelas ketika Prabowo menegaskan komitmen Indonesia pada multilateralisme dan solidaritas global. Kredibilitasnya sebagai Presiden baru yang berangkat dari latar belakang militer diperkuat dengan sikap tegas namun rendah hati. Menurut McCroskey (2006), *ethos* memainkan peran krusial dalam komunikasi politik karena kredibilitas pembicara sering kali menjadi faktor penentu diterima atau tidaknya pesan yang disampaikan.

Pada level *pathos*, Prabowo menggunakan isu Palestina sebagai instrumen retorik untuk menggugah empati audiens internasional. Ia menyoroti penderitaan rakyat Palestina dengan bahasa yang menekankan aspek kemanusiaan universal. Perpaduan antara diksi yang lugas dan nuansa emosional ini selaras dengan temuan Bruner (2002) bahwa narasi dengan muatan emosional mampu memperkuat daya persuasif dalam retorika politik.

Selain itu, strategi *logos* hadir melalui penyajian data empiris seperti capaian swasembada beras dan program energi terbarukan. Penyajian bukti konkret memperkuat argumen bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara normatif, melainkan juga menampilkan solusi praktis untuk masalah global. Sebagaimana Toulmin (2003) menegaskan, kekuatan argumen retorik terletak pada kemampuan menghubungkan klaim dengan data yang dapat diverifikasi.

Prabowo juga memanfaatkan retorika inklusif dengan penggunaan istilah seperti *kesetaraan universal* dan *solidaritas kemanusiaan*. Retorika inklusif ini penting untuk membangun citra Indonesia sebagai jembatan antarbangsa. Fairclough (1995) menilai bahwa retorika inklusif dapat membentuk wacana hegemonik baru yang memperluas legitimasi pembicara di mata audiens global.

Strategi retorika simbolik juga hadir dalam cara Prabowo mengaitkan sejarah perjuangan Indonesia dengan isu keadilan global masa kini. Dengan menyamakan perjuangan Palestina dengan pengalaman kolonial Indonesia, ia menggunakan *historical analogy* sebagai sarana untuk membangun resonansi emosional dan solidaritas politik. Analogi historis semacam ini, menurut Lakoff (2004), efektif dalam mengikat pengalaman kolektif masa lalu dengan konteks kontemporer.

Selain itu, Prabowo memanfaatkan struktur pidato yang terorganisir dengan baik. Dimulai dari prinsip kesetaraan universal, kemudian isu Palestina, dilanjutkan dengan peran Indonesia dalam perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Struktur yang sistematis ini mendukung kejelasan pesan serta memperkuat daya retoriknya. Meyer (2000) menyebut bahwa struktur pesan yang runtut merupakan kunci dalam menjaga kohesi retorika politik di forum publik.

Secara keseluruhan, strategi retorika yang digunakan Prabowo dalam pidatonya memperlihatkan perpaduan antara aspek kredibilitas pribadi, penguatan emosional, dan logika argumentatif. Pendekatan ini tidak hanya efektif untuk memengaruhi audiens di ruang sidang PBB, tetapi juga mampu meneguhkan posisi Indonesia sebagai aktor moral dalam sistem internasional. Dengan kata lain, retorika Prabowo berhasil memadukan kepentingan politik domestik dan global dalam satu bingkai komunikasi yang persuasif.

7. Konteks dan Relevansi Global

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik global yang sedang mengalami ketegangan. Isu Palestina yang menjadi fokus utama mencerminkan problem struktural dalam tata dunia, di mana ketidakadilan dan ketimpangan kekuatan antarnegara masih berlangsung. Menurut Falk (2017), kegagalan komunitas internasional dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel adalah simbol krisis legitimasi multilateralisme. Dengan mengangkat isu ini, Prabowo menempatkan Indonesia dalam arus besar perdebatan global mengenai keadilan dan kemanusiaan.

Konteks relevansi pidato ini juga berkaitan dengan peran Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang memiliki sejarah panjang dalam solidaritas internasional. Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sejak era Presiden Soekarno. Pidato Prabowo melanjutkan tradisi diplomasi moral ini, yang menurut Anwar (2020) menjadi salah satu identitas tetap politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, pidato ini bukan sekadar pernyataan politik, melainkan juga artikulasi identitas historis bangsa di panggung global.

Selain itu, pidato ini relevan dalam kaitannya dengan dinamika *Global South*. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan struktural dalam sistem internasional, mulai dari ketidaksetaraan ekonomi hingga dampak perubahan iklim. Menurut Acharya (2018), solidaritas *Global South* sering diekspresikan melalui forum multilateral untuk menantang dominasi negara-negara besar. Dalam konteks ini, Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai bagian dari *Global South* yang aktif mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil.

Relevansi pidato ini juga dapat dilihat dari isu ketahanan pangan dan transisi energi yang diangkat Prabowo. Dua isu ini merupakan agenda global kontemporer yang mendapat perhatian luas dari PBB dan negara-negara anggotanya. Menurut Clapp (2017), ketahanan pangan bukan lagi isu domestik semata, melainkan telah menjadi bagian dari politik global karena dampaknya yang lintas batas. Dengan memposisikan Indonesia sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras, Prabowo berusaha menghadirkan Indonesia sebagai model sekaligus mitra dalam solusi global.

Di sisi lain, penekanan pada komitmen Indonesia terhadap transisi energi memiliki relevansi strategis dalam menghadapi krisis iklim. Indonesia, sebagai salah satu penghasil emisi terbesar, dipandang memiliki tanggung jawab moral sekaligus kapasitas nyata untuk berkontribusi. Menurut Keohane dan Victor (2016), legitimasi kepemimpinan iklim global hanya akan terbangun jika negara-negara besar dan berkembang sama-sama mengambil peran aktif. Dengan menyampaikan pesan ini di forum PBB, Prabowo memperkuat relevansi Indonesia dalam diskursus transisi energi global.

Secara keseluruhan, pidato ini memiliki relevansi ganda, baik untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional maupun untuk merespons isu-isu global yang mendesak. Konteks geopolitik, identitas historis Indonesia, solidaritas Global South, serta tantangan pangan dan energi menjadi bingkai besar yang memperlihatkan bahwa pidato Prabowo bukan hanya respons terhadap isu aktual, tetapi juga upaya proaktif membentuk arah tata dunia. Relevansi global pidato ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengimplementasikan pesan-pesan yang telah disampaikan.

8. Diskusi Teoritis

Analisis terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB ke-80 menunjukkan relevansi penerapan model komunikasi Harold D. Lasswell sebagai kerangka utama. Melalui unsur *who says what in which channel to whom with what effect*, pidato ini dapat dipetakan secara sistematis sehingga pesan politik yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. Lasswell (1948) menekankan pentingnya memandang komunikasi sebagai proses yang terstruktur, dan hal ini tampak nyata dalam konstruksi pidato Prabowo yang menyasar audiens global dengan isu kemanusiaan yang universal.

Selain Lasswell, pendekatan retorika Aristotelian memberikan dimensi tambahan dalam menganalisis strategi komunikasi politik. Aristoteles menekankan tiga aspek utama, yaitu *ethos*, *pathos*, dan *logos* (Aristotle, trans. 2007). Pidato Prabowo memperlihatkan dominasi *ethos* melalui legitimasi posisinya sebagai Presiden RI, *pathos* melalui seruan emosional terkait penderitaan Palestina, dan *logos* melalui penyajian data mengenai capaian ketahanan pangan dan komitmen terhadap perubahan iklim. Kombinasi ini memperkuat daya persuasif pidato di panggung internasional.

Di sisi lain, perspektif *framing theory* yang dikembangkan oleh Entman (1993) juga relevan untuk memahami cara pesan Prabowo dikemas. Pidato tersebut tidak hanya menyajikan fakta, melainkan juga membingkai isu-isu tertentu seperti Palestina, ketahanan pangan, dan perubahan iklim sebagai bagian dari tanggung jawab moral global. Framing ini membuat audiens melihat isu-isu tersebut bukan sekadar problem regional, melainkan tantangan universal yang membutuhkan solidaritas internasional.

Teori legitimasi internasional juga memberikan sudut pandang kritis terhadap pidato ini. Menurut Suchman (1995), legitimasi adalah persepsi kolektif bahwa tindakan aktor sesuai dengan nilai dan norma sosial. Prabowo, melalui pidatonya, berusaha membangun citra bahwa Indonesia adalah aktor yang sah, kredibel, dan bertanggung jawab dalam isu global. Upaya ini penting karena legitimasi internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material, tetapi juga oleh kredibilitas moral dan konsistensi dalam menjalankan komitmen.

Dalam konteks hubungan internasional, pidato ini memperlihatkan keberlanjutan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sebagaimana ditegaskan oleh Sukma (2011), kebijakan luar negeri Indonesia selalu menekankan keseimbangan antara kepentingan nasional dan solidaritas global. Prabowo mengaktualisasikan prinsip tersebut dengan menawarkan kontribusi konkret, seperti mengirim pasukan perdamaian dan bantuan pangan, yang sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global.

Secara teoretis, analisis pidato Prabowo memperlihatkan bahwa kombinasi beberapa teori komunikasi dan hubungan internasional dapat memberikan gambaran yang lebih tajam. Lasswell membantu memetakan struktur komunikasi, Aristoteles menyoroti strategi retorika, Entman menekankan aspek *framing*, dan teori legitimasi menjelaskan implikasi globalnya. Dengan demikian, pidato ini bukan hanya fenomena politik sesaat, tetapi juga contoh bagaimana

komunikasi politik dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk citra, mempengaruhi persepsi, dan memperkuat posisi Indonesia di dunia.

KESIMPULAN

Analisis terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB ke-80 menunjukkan bahwa pidato tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk komunikasi politik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang memperkuat citra Indonesia di panggung global. Melalui kerangka Lasswell, dapat dilihat bahwa pesan yang disampaikan terstruktur dengan baik, komunikator memiliki kredibilitas yang tinggi, saluran komunikasi internasional dimanfaatkan secara efektif, audiens global berhasil dijangkau, dan efek komunikasi berupa peningkatan legitimasi serta posisi tawar Indonesia dapat diidentifikasi secara nyata.

Pidato ini juga memperlihatkan penggunaan strategi retorika yang kuat, mencakup aspek *ethos*, *pathos*, dan *logos*, sehingga pesan yang dibawa tidak hanya logis tetapi juga emosional dan etis. Isu-isu yang dibingkai, seperti Palestina, ketahanan pangan, dan perubahan iklim, ditempatkan dalam konteks universal sehingga menumbuhkan rasa urgensi dan solidaritas global. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik dalam forum internasional dapat berfungsi sebagai alat diplomasi yang tidak hanya menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga menghubungkannya dengan kepentingan global.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar penelitian lebih lanjut memperluas kajian terhadap pidato-pidato politik Indonesia di forum internasional lainnya untuk melihat konsistensi strategi komunikasi dan dampaknya terhadap legitimasi global. Selain itu, praktisi komunikasi politik dapat mengambil pelajaran bahwa keberhasilan pidato internasional ditentukan oleh kemampuan menyatukan legitimasi nasional, strategi retorika, serta pemahaman terhadap isu-isu global yang relevan. Dengan demikian, komunikasi politik dapat menjadi sarana efektif dalam membangun citra bangsa sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam tatanan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing global order: Agency and change in world politics*. Cambridge University Press.
- Acharya, A. (2018). *Constructing global order: Agency and change in world politics*. Cambridge University Press.
- Anholt, S. (2007). *Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions*. Palgrave Macmillan.
- Anwar, D. F. (2020). Foreign policy, Islam and democracy in Indonesia. *Journal of International Relations and Development*, 23(2), 379–402.
- Aristotle. (2007). *On rhetoric: A theory of civic discourse* (G. A. Kennedy, Trans., 2nd ed.). Oxford University Press.
- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press.
- Beasley, V. B., & Rudd, J. (2006). *Blackwell guide to rhetoric*. Blackwell.
- Bjola, C., & Kornprobst, M. (2013). *Understanding international diplomacy: Theory, practice and ethics*. Routledge.
- Bruner, J. (2002). *Making stories: Law, literature, life*. Harvard University Press.
- Charteris-Black, J. (2011). *Politicians and rhetoric: The persuasive power of metaphor* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.

- Clapp, J. (2017). Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense. *Food Policy*, 66, 88–96.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Crystal, D. (2003). *English as a global language* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Cull, N. J. (2009). *Public diplomacy: Lessons from the past*. Figueroa Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Edwards, J. A. (2009). Presidential rhetoric and public diplomacy: The case of Bush after 9/11. *Rhetoric and Public Affairs*, 12(4), 607–632.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Entman, R. M. (2008). Media framing biases and political power: Explaining slant in news of Campaign 2008. *Journalism*, 9(2), 204–226.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Falk, R. (2017). Palestine's right of resistance and international law. *Journal of Palestine Studies*, 46(3), 7–19.
- Foss, S. K. (2018). *Rhetorical criticism: Exploration and practice* (5th ed.). Waveland Press.
- Gilboa, E. (2008). Searching for a theory of public diplomacy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 55–77.
- Graber, D. A. (2001). *Mass media and American politics* (6th ed.). CQ Press.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.
- Jönsson, C., & Hall, M. (2005). *Essence of diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB ke-80*. Jakarta: Setneg RI.
- Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2016). Cooperation and discord in global climate policy. *Nature Climate Change*, 6(6), 570–575.
- Lakoff, G. (2004). *Don't think of an elephant!: Know your values and frame the debate*. Chelsea Green Publishing.
- Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), *The communication of ideas* (pp. 37–51). Harper & Row.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: Social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143–150.
- McCroskey, J. C. (2006). *An introduction to rhetorical communication* (9th ed.). Allyn & Bacon.
- McNair, B. (2018). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.

- Melissen, J. (Ed.). (2005). *The new public diplomacy: Soft power in international relations*. Palgrave Macmillan.
- Meyer, M. (2000). Rhetoric in politics, rhetoric in academia. *Argumentation*, 14(3), 329–343.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Perloff, R. M. (2017). *The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 21st century* (6th ed.). Routledge.
- Perloff, R. M. (2021). *The dynamics of political communication: Media and politics in a digital age* (3rd ed.). Routledge.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Sukma, R. (2011). Indonesia finds a new voice. *Journal of Democracy*, 22(4), 110–123.
- Suryadinata, L. (2017). *Indonesia's foreign policy under Soeharto: Aspiring to international leadership*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Suryokusumo, S. (2014). Diplomasi dan komunikasi politik Presiden Indonesia di forum internasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 15–28.
- Toulmin, S. (2003). *The uses of argument* (Updated ed.). Cambridge University Press.
- Weiss, T. G., Forsythe, D. P., & Coate, R. A. (2018). *The United Nations and changing world politics* (8th ed.). Routledge.